

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Permasalahan *child trafficking* saat ini menjadi persoalan yang tidak manusiawi bagi berbagai pihak dan tentu saja merupakan pelanggaran HAM. Korban – korban perdagangan yang tidak lagi hanya sebatas pria dan wanita tetapi juga sudah merambah ke anak-anak berusia di bawah umur menjadi permasalahan bagi Vietnam dan Kamboja. Perdagangan anak secara global sangat memprihantinkan dan menarik perhatian masyarakat internasional terbukti dengan maraknya perdagangan anak yang terjadi dunia. Menurut data dari UNICEF, 1,2 sampai 1,8 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya, jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan berasal dan Asia diperkirakan berkisar 250.000-400.000 (yaitu 30% dari angka global).

Perdagangan anak atau *child trafficking* adalah sesuatu bentuk terburuk dari eksploitasi terhadap anak yang banyak terjadi pada negara berkembang seperti Vietnam dan Kamboja. *Trafficking* menjadi masalah yang cukup penting bagi kedua negara karena telah menghancurkan ribuan kehidupan manusia, terutama banyak terjadi pada wanita dan anak-anak. Vietnam sebagai salah satu negara anggota ASEAN dengan letak geografis yang sangat strategis membuat Vietnam menjadi pangsa pasar yang bagus sebagai tempat transit, tujuan, bahkan sumber dari kegiatan perdagangan anak khususnya dikawasan Asia Tenggara. Vietnam telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi perdagangan anak dinegaranya, salah satunya adalah upaya kerjasama bilateral dengan Kamboja untuk mengatasi perdagangan anak yang merupakan: *Agreement With Cambodia on Cooperation to Combat Trafficking in Women and Children* (2005), *Agreement between Cambodian and Vietnamese Police* (2007), *Agreement with Cambodia on standard operating procedurs on identifications and repatriation of trafficked victims* (2009). Komitmen tinggi dan keseriusan pemerintah Vietnam terhadap permasalahan perdagangan anak telah meningkatkan Vietnam dari posisi “Tier 3”

berdasarkan standar penanganan korban perdagangan orang menjadi “Tier 2 *Watch List*” yang berarti tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA tetapi membuat upaya – upaya yang signifikan untuk membawa negaranya memenuhi standar TVPA, dan terdapat berbagai permasalahan seperti : meningkatnya jumlah absolut korban perdagangan, ada bukti kegagalan dalam upaya mengurangi perdagangan manusia dari tahun sebelumnya, dan adanya penentuan bahwa suatu negara harus membuat upaya – upaya yang signifikan untuk memenuhi standar minimum TVPA yang didasari oleh komitmen negara tersebut untuk mengambil langkah lebih jauh di tahun berikutnya. (Tier 3 adalah negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak membuat upaya yang signifikan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia)

#### **IV.2 Saran**

Pemerintah Vietnam harus secara ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku atau jaringan perdagangan anak di Vietnam dan lebih memaksimalkan kerjasama dengan pihak organisasi regional nya yaitu ASEAN atau negara-negara tetangga. Hal ini mengingat bahwa modus operandi sindikat perdagangan anak dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dengan mudah memasuki suatu negara oleh karena itu setiap aparat penegak hukum Vietnam harus lebih cerdas dan lebih sigap dalam hal mengantisipasi masalah ini.